

Peran Penjamin Mutu Internal dengan Sekolah Unggul (Studi Kasus: SMP N 2 Tarutung)

Mei Manullang^{1*}, Riamin Sinaga², Andar Gunawan Pasaribu³

¹⁻³Manajemen Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

Email: meimanullang84@gmail.com^{1*}, andargunawanpasaribu@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: meimanullang84@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to analyze the role of Internal Quality Assurance (IQA) in creating and maintaining excellent schools. IQA is a systematic mechanism designed to ensure that all educational processes operate according to established quality standards while serving as a means for continuous evaluation and improvement. This research employs a literature study method with a descriptive qualitative approach, utilizing secondary sources such as books, scientific journals, government regulations, and relevant previous studies. The findings indicate that IQA plays a strategic role in building an education system oriented toward quality and accountability. Through the implementation of the Plan-Do-Check-Act (PDCA) cycle, schools are able to establish measurable quality standards, control learning processes, and conduct continuous evaluations of educational outcomes. The implementation of IQA also fosters a culture of quality that encourages collective awareness among all school members regarding the importance of continuous improvement. However, IQA implementation still faces several challenges, including limited competent human resources, lack of leadership commitment, inadequate facilities and infrastructure, and resistance to change. A case study at SMP Negeri 2 Tarutung reveals that the success of IQA is determined by visionary leadership, stakeholder support, and the use of data-based quality information systems. Therefore, IQA functions not only as a supervisory tool but also as a managerial strategy for achieving holistic and sustainable educational quality improvement.*

Keywords: *Educational Evaluation; Educational Quality Management; Excellent School; Internal Quality Assurance; Quality Improvement Strategy*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Penjaminan Mutu Internal (PMI) dalam menciptakan dan mempertahankan sekolah unggulan. PMI merupakan mekanisme sistematis yang memastikan seluruh proses pendidikan berjalan sesuai standar mutu serta menjadi sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, regulasi pemerintah, dan hasil penelitian relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMI memiliki peran strategis dalam membangun sistem pendidikan yang berorientasi pada kualitas dan akuntabilitas. Melalui penerapan siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA), sekolah mampu menetapkan standar mutu yang terukur, mengontrol proses pembelajaran, dan melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap hasil pendidikan. Implementasi PMI juga menumbuhkan budaya mutu (quality culture) yang mendorong kesadaran kolektif seluruh warga sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Namun demikian, pelaksanaan PMI masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya komitmen kepemimpinan, keterbatasan sarana prasarana, serta resistensi terhadap perubahan. Studi kasus di SMP Negeri 2 Tarutung menunjukkan bahwa keberhasilan PMI sangat ditentukan oleh kepemimpinan visioner, dukungan stakeholder, dan pemanfaatan sistem informasi mutu berbasis data. Dengan demikian, PMI tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai strategi manajerial untuk peningkatan mutu pendidikan yang holistik dan berkelanjutan.

Kata kunci: Evaluasi Pendidikan; Manajemen Mutu Pendidikan; Penjaminan Mutu Internal; Sekolah Unggulan; Strategi Peningkatan Mutu

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan memiliki peran vital dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, yang pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Untuk memastikan kualitas pendidikan, diperlukan sistem penjaminan mutu yang berkesinambungan dan sistemik. Di Indonesia, penjaminan mutu pendidikan diatur melalui Sistem Penjaminan

Mutu Internal (PMI), yang fungsinya adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan (Suryadi & Nurhadi, 2020).

Masalahnya, meskipun sekolah-sekolah unggul diharapkan menjadi tolak ukur kualitas pendidikan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam mencapai standar mutu yang diinginkan. Kualitas yang belum optimal ini sering kali disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah belum optimalnya pelaksanaan dan peran Penjaminan Mutu Internal (PMI) di tingkat sekolah (Supriyadi, 2019). Contoh kasus dapat dilihat di SMP N 2 Tarutung yang menjadi fokus dalam kajian ini.

Kondisi kurang mutu di SMP N 2 Tarutung tampak dari hasil wawancara yang menunjukkan beberapa indikator, seperti hasil belajar siswa yang belum mencapai standar ketuntasan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar, belum optimalnya kompetensi dan profesionalisme guru, serta kurangnya keterlibatan aktif orang tua dalam proses pendidikan. Selain itu, budaya sekolah juga belum sepenuhnya kondusif untuk mendukung peningkatan mutu secara menyeluruh, termasuk peran Penjaminan Mutu Internal (PMI) yang belum berjalan optimal (Sagala, 2021)

Berbagai masalah tersebut diperparah dengan belum optimalnya pelaksanaan sistem evaluasi dan pemantauan mutu secara berkelanjutan. Tidak adanya program peningkatan mutu yang terstruktur dan berbasis data, serta kurangnya koordinasi dan komitmen seluruh warga sekolah dalam menjalankan Penjaminan Mutu Internal (PMI), menjadi hambatan utama dalam mencapai mutu pendidikan yang diharapkan (Zainuddin, 2020; Arifin & Nurfadilah, 2022).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran Penjaminan Mutu Internal (PMI) di sekolah unggul seperti SMP N 2 Tarutung dapat dioptimalkan untuk mengatasi masalah-masalah mutu yang teridentifikasi dan mewujudkan visi-misi sekolah demi peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan (Siregar, 2023; Handayani & Wibowo, 2021).

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Sekolah Unggulan

Sekolah unggulan adalah sekolah yang memiliki karakteristik khusus berupa kualitas pendidikan yang lebih baik dibanding sekolah pada umumnya. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sekolah unggulan adalah sekolah yang memiliki kinerja akademik dan non-akademik yang tinggi, didukung oleh fasilitas dan sumber daya yang memadai, serta mampu berinovasi dalam proses pembelajaran.

Menurut Suparman (2018), sekolah unggulan ditandai oleh kemampuan dalam menerapkan kurikulum secara efektif, menerapkan manajemen sekolah yang profesional, serta memiliki prestasi yang konsisten di tingkat daerah maupun nasional. Ciri utama sekolah unggulan antara lain: (1) memiliki budaya mutu yang kuat, (2) dipimpin oleh kepala sekolah yang visioner, (3) tenaga pendidik profesional, (4) partisipasi aktif masyarakat, dan (5) hasil belajar yang melampaui standar nasional.

Sementara itu, Sagala (2019) menegaskan bahwa sekolah unggulan tidak hanya menonjol dalam pencapaian akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter, disiplin, dan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, komunikasi efektif, dan kolaborasi. Sekolah unggulan umumnya memiliki sistem manajemen yang transparan, perencanaan strategis jangka panjang, serta budaya organisasi yang mendukung inovasi dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).

Dengan demikian, sekolah unggulan dapat dipandang sebagai lembaga yang mampu menerapkan prinsip Total Quality Management (TQM) dalam pendidikan. Prinsip ini menekankan keterlibatan semua pihak (stakeholder) dalam meningkatkan mutu, fokus pada kepuasan pelanggan (peserta didik dan masyarakat), dan perbaikan berkelanjutan (Sallis, 2014). Dalam konteks globalisasi dan revolusi industri 4.0, sekolah unggulan juga diidentikkan dengan kemampuan adaptif terhadap teknologi pendidikan dan pembelajaran digital.

Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan merupakan tingkat pencapaian standar pendidikan yang meliputi aspek input, proses, dan output. Menurut Sallis (2014), mutu pendidikan adalah hasil dari proses pembelajaran yang mampu memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder, seperti siswa, orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

Menurut Edward Sallis dan Deming (1993), mutu bukan hanya hasil akhir (output) tetapi mencakup keseluruhan sistem pendidikan mulai dari perencanaan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, hingga tindak lanjut. Dengan kata lain, mutu pendidikan merupakan akumulasi dari seluruh aktivitas sekolah yang berjalan secara efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Standar mutu pendidikan secara umum merujuk pada kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan (Permendikbud, 2016). Mutu pendidikan dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu Perspektif internal, yang menilai kesesuaian proses dengan standar mutu internal lembaga, dan Perspektif

eksternal, yang menilai relevansi hasil pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Selain itu, pendekatan mutu dalam pendidikan juga telah berkembang dari model tradisional ke model mutu berbasis pelanggan (*customer-based quality*), di mana peserta didik, orang tua, dan masyarakat menjadi fokus utama dalam penilaian keberhasilan pendidikan (Owlia & Aspinwall, 1996). Peningkatan mutu pendidikan membutuhkan sinergi antara kepemimpinan yang efektif, budaya organisasi yang kondusif, serta sistem evaluasi yang objektif dan berkelanjutan. Tanpa adanya sistem penjaminan mutu yang kuat, sulit bagi lembaga pendidikan untuk mempertahankan reputasi dan keunggulan kompetitifnya..

Penjamin Mutu Internal

Penjaminan Mutu Internal (PMI) merupakan sistem yang diterapkan secara internal oleh lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa seluruh proses dan hasil pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Suryadi, 2020). PMI berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan evaluasi berkelanjutan guna menjaga serta meningkatkan kualitas pendidikan (Zainuddin, 2020). PMI berperan sebagai alat kontrol dan pengembangan yang membantu lembaga pendidikan dalam menetapkan standar mutu yang jelas, memantau dan mengevaluasi pencapaian standar, melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan (Arifin, 2022).

Lebih lanjut, PMI merupakan penerapan prinsip manajemen mutu dalam konteks pendidikan, di mana seluruh unsur sekolah, kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan peserta didik, berpartisipasi aktif dalam menjaga mutu pembelajaran (Nasution, 2022). Dengan demikian, PMI tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada transformasi budaya organisasi menuju kesadaran mutu di setiap lini sekolah (Simanjuntak, 2023). Wahyudi (2021) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi PMI sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan sekolah, partisipasi aktif seluruh warga sekolah, ketersediaan data serta sistem informasi mutu yang akurat, dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, PMI menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sekolah unggulan. Tanpa sistem penjaminan mutu yang kuat, upaya peningkatan kualitas pendidikan akan bersifat insidental dan sulit untuk berkelanjutan, sebagaimana dapat diamati pada praktik di beberapa sekolah unggulan seperti SMP pilihan (Siregar, 2023).

Fungsi dan Pean Penjamin Mutu Internal

Penjaminan Mutu Internal (PMI) memiliki beberapa fungsi utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Secara umum, PMI berperan dalam melakukan monitoring dan

evaluasi terhadap proses serta hasil pembelajaran, mengidentifikasi kekurangan dan potensi perbaikan, mendorong inovasi dan peningkatan kualitas pembelajaran, menyusun standar operasional prosedur (SOP) bagi berbagai kegiatan pendidikan, serta menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen sekolah (Santoso, 2020). Peran PMI tidak hanya terbatas pada pemenuhan tuntutan akreditasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap kegiatan pendidikan benar-benar memberikan nilai tambah bagi peserta didik (Handayani, 2021). Dengan adanya sistem PMI yang kuat, sekolah memiliki dasar yang jelas dalam pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based decision making*), sehingga kebijakan yang diambil lebih objektif dan terarah (Arifin, 2022).

Selain itu, PMI berperan penting dalam membangun budaya mutu yang berorientasi pada kolaborasi, evaluasi diri, dan tanggung jawab bersama (Wahyudi, 2021). Budaya mutu ini menjadi inti dari keberlanjutan lembaga pendidikan, karena menumbuhkan kesadaran kolektif seluruh warga sekolah akan pentingnya peningkatan kualitas secara berkelanjutan (Simanjuntak, 2023). Dengan demikian, keberadaan PMI tidak hanya memperkuat sistem manajerial sekolah, tetapi juga meneguhkan karakteristik sekolah unggulan yang memiliki komitmen terhadap mutu dan keberlanjutan dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikannya (Siregar, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian yang relevan mengenai penjaminan mutu internal serta implementasinya dalam mewujudkan sekolah unggulan (Creswell & Poth, 2018). Langkah-langkah penelitian meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) identifikasi sumber data berupa buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, regulasi pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu; (2) analisis isi (*content analysis*) terhadap konsep-konsep kunci seperti mutu pendidikan, manajemen mutu, dan karakteristik sekolah unggulan; (3) sintesis literatur dengan cara membandingkan berbagai pandangan untuk menemukan benang merah teori serta praktik terbaik (*best practices*) dalam penerapan Penjaminan Mutu Internal (PMI); dan (4) interpretasi hasil, yakni penarikan kesimpulan teoretis mengenai peran PMI dalam menciptakan sekolah unggulan.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara konseptual dan sistematis tanpa harus melakukan penelitian lapangan. Validitas data diperoleh melalui penggunaan sumber-sumber akademik yang kredibel, terstruktur, dan relevan, sehingga hasil

kajian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai keberadaan dan peran strategis PMI dalam membentuk sekolah unggulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Penjamin Mutu Internal dalam Sekolah Unggulan

Penjaminan Mutu Internal (PMI) berperan sebagai pengendali utama dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. PMI bertugas memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran, administrasi, serta manajemen sekolah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks sekolah unggulan, PMI menjadi pilar penting yang menjamin agar kualitas pendidikan tidak menurun, melainkan terus berkembang secara berkelanjutan. PMI bertujuan memastikan bahwa seluruh tahapan pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, berjalan selaras dengan standar nasional dan kebutuhan para stakeholder. Peran PMI sangat signifikan karena membantu sekolah dalam menetapkan indikator mutu yang jelas dan terukur, mengontrol konsistensi proses pembelajaran, melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap hasil belajar dan kinerja pendidik, serta menyusun rencana tindak lanjut untuk perbaikan mutu secara sistematis.

Selain itu, PMI juga memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan akuntabilitas lembaga pendidikan. Melalui penerapan sistem mutu yang transparan, sekolah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, pemerintah, dan orang tua peserta didik. Akuntabilitas ini menjadi landasan utama bagi terbentuknya kepercayaan publik terhadap reputasi sekolah unggulan. Tidak hanya itu, PMI turut mendorong terbentuknya budaya organisasi yang berorientasi pada mutu (*quality culture*), di mana seluruh warga sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik, memiliki kesadaran kolektif bahwa peningkatan mutu merupakan tanggung jawab bersama.

Dalam era kompetisi pendidikan modern, PMI menjadi instrumen penting untuk mempertahankan daya saing sekolah. Sekolah dengan sistem mutu internal yang kuat cenderung lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan pendidikan, kemajuan teknologi pembelajaran, serta tuntutan masyarakat terhadap lulusan yang berkualitas. Namun, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan PMI di SMP Negeri 2 Tarutung masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah hasil belajar siswa yang belum mencapai standar ketuntasan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, kompetensi dan profesionalisme guru yang belum optimal, kurangnya keterlibatan aktif orang tua dalam proses pendidikan, serta budaya sekolah yang belum sepenuhnya kondusif bagi peningkatan mutu secara menyeluruh.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran Penjaminan Mutu Internal di sekolah unggulan, khususnya di SMP Negeri 2 Tarutung, dapat dioptimalkan guna mengatasi permasalahan mutu yang teridentifikasi. Optimalisasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi sekolah serta menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Berdasarkan temuan ini, penting untuk menilai sejauh mana peran PMI memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan mutu sekolah unggulan, terutama dalam konteks implementasinya di SMP Negeri 2 Tarutung.

Strategi Pelaksanaan PMI di Sekolah Unggulan

Agar Penjaminan Mutu Internal (PMI) berjalan secara efektif, sekolah perlu menerapkan strategi yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan. Pelaksanaan PMI di sekolah unggulan meliputi empat tahapan utama yang membentuk siklus penjaminan mutu (quality assurance cycle), yaitu perencanaan mutu, pelaksanaan mutu, evaluasi dan monitoring, serta tindak lanjut dan peningkatan mutu.

Tahap pertama adalah Perencanaan Mutu (Quality Planning). Pada tahap ini, sekolah menetapkan visi, misi, dan standar mutu yang ingin dicapai sebagaimana diterapkan di SMP Negeri 2 Tarutung. Indikator mutu mencakup aspek akademik, manajerial, serta kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. Perencanaan mutu ini harus selaras dengan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) agar memiliki arah yang jelas dan terukur.

Tahap kedua, Pelaksanaan Mutu (Quality Implementation), melibatkan seluruh komponen sekolah. Guru bertanggung jawab melaksanakan pembelajaran sesuai standar, kepala sekolah memastikan efektivitas manajemen dan supervisi, sedangkan tenaga kependidikan mendukung aspek administratif. Pelaksanaan mutu yang baik ditandai oleh konsistensi, komunikasi yang terbuka, serta kolaborasi antarbagian dalam mencapai tujuan bersama.

Tahap ketiga adalah Evaluasi dan Monitoring (Quality Evaluation), yang bertujuan menilai sejauh mana standar mutu telah tercapai. Evaluasi dilakukan melalui supervisi kelas, penilaian kinerja guru, survei kepuasan stakeholder, dan analisis hasil belajar peserta didik. Data hasil evaluasi menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan di tahap berikutnya.

Tahap keempat, Tindak Lanjut dan Peningkatan Mutu (Quality Improvement), dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Sekolah melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) melalui program pengembangan profesional guru, revisi kurikulum, peningkatan sarana prasarana, serta inovasi pembelajaran berbasis teknologi.

Keberhasilan strategi PMI sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh warga sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin transformasional yang tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai motivator dan fasilitator perubahan. Robbins dan Coulter (2018) menegaskan bahwa kepemimpinan transformasional efektif dalam membangun kesadaran mutu karena mampu mendorong perubahan budaya organisasi dari dalam.

Selain kepemimpinan, dukungan data yang akurat juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan PMI. Sekolah unggulan umumnya memanfaatkan School Quality Management Information System (SQMIS) atau sistem basis data digital untuk memantau kinerja akademik, absensi, hasil evaluasi, serta indikator mutu lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi mempercepat proses evaluasi dan meningkatkan efisiensi pelaporan mutu sekolah.

Beberapa sekolah negeri dan swasta unggulan di Indonesia telah menerapkan model School-Based Quality Assurance (SBQA), di mana sekolah memiliki otonomi dalam menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi program mutu berdasarkan kebutuhan lokal, namun tetap berpedoman pada standar nasional. Dalam konteks SMP Negeri 2 Tarutung, penerapan strategi PMI masih bersifat konvensional, namun mulai berkembang dengan memanfaatkan digitalisasi sesuai kemampuan dan sumber daya yang tersedia.

Melalui kegiatan tindak lanjut yang berkelanjutan, sekolah dapat memperkuat pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal sehingga peningkatan mutu yang diharapkan dapat terlihat secara nyata. Strategi ini menjadi dasar penting bagi pengembangan dan kemajuan sekolah, sekaligus memastikan keberlanjutan mutu pendidikan di masa yang akan datang.

Tantangan dan Hambatan dalam Pelaksanaan PMI

Meskipun Penjaminan Mutu Internal (PMI) memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kualitas pendidikan, pelaksanaannya di sekolah seringkali menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat sejumlah tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan sistem ini. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu persoalan yang cukup menonjol. Tidak semua sekolah memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang memahami konsep manajemen mutu secara komprehensif. Banyak guru yang masih berorientasi pada rutinitas mengajar semata dan belum menginternalisasi pentingnya evaluasi serta peningkatan mutu secara sistematis. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran yang masih dilakukan dengan menggunakan media seadanya, bahkan beberapa guru yang sudah berusia lanjut masih mempertahankan sistem lama. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya peningkatan kualitas diri sebagai bagian dari upaya menunjang pembelajaran yang bermutu.

Kedua, kurangnya komitmen kepemimpinan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan PMI. Penjaminan mutu hanya dapat berjalan efektif jika didukung penuh oleh pimpinan sekolah. Apabila kepala sekolah tidak memiliki visi mutu yang jelas atau kurang memberikan dukungan terhadap proses evaluasi internal, maka pelaksanaan PMI cenderung hanya menjadi formalitas administratif. Diperlukan tindakan nyata dan kepemimpinan yang partisipatif agar hasil dari kegiatan mutu ini dapat dirasakan secara langsung oleh warga sekolah.

Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana turut memengaruhi efektivitas sistem penjaminan mutu. Pelaksanaan PMI yang baik memerlukan dukungan data, perangkat evaluasi, serta teknologi informasi yang memadai. Sekolah dengan sumber daya terbatas seringkali mengalami kesulitan dalam menerapkan sistem digital atau menyusun instrumen mutu yang komprehensif. Kondisi jaringan internet yang lambat juga menjadi hambatan teknis yang berdampak negatif terhadap proses pelaksanaan PMI.

Keempat, resistensi terhadap perubahan menjadi tantangan yang cukup besar. Budaya kerja yang belum terbuka terhadap evaluasi dan kritik menyebabkan beberapa guru atau staf menganggap evaluasi mutu sebagai bentuk pengawasan yang negatif, bukan sebagai kesempatan untuk melakukan perbaikan. Sikap seperti ini membuat proses penjaminan mutu belum dipahami sebagai sarana pencerahan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Kelima, kurangnya integrasi antara PMI dan sistem akreditasi sekolah juga menjadi kendala yang sering muncul. Pelaksanaan PMI sering tidak berjalan selaras dengan sistem akreditasi yang diterapkan oleh pemerintah sehingga prosesnya tidak dimanfaatkan secara optimal sebagai alat refleksi dan pengembangan diri sekolah.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, sekolah perlu menumbuhkan komitmen kolektif terhadap mutu pendidikan. Pelatihan manajemen mutu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kepemimpinan yang partisipatif menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan PMI. Selain itu, kolaborasi antar sekolah melalui forum penjaminan mutu atau *community of practice* juga efektif dalam berbagi pengalaman dan inovasi mutu. Pada tataran kebijakan, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan perlu menyediakan pendampingan teknis serta sistem monitoring yang adaptif agar PMI dapat dijalankan secara berkelanjutan, bukan sekadar untuk memenuhi kewajiban administratif. Kolaborasi yang baik antara sekolah dan dinas pendidikan memiliki peranan penting dalam memastikan keberhasilan implementasi penjaminan mutu internal di setiap satuan pendidikan.

Studi Kasus: Penerapan PMI di Sekolah Unggulan SMP N2 Tarutung

Sekolah Unggulan SMP Negeri 2 Tarutung merupakan salah satu lembaga pendidikan menengah di Indonesia yang berhasil mengimplementasikan sistem Penjaminan Mutu Internal

(PMI) secara efektif. Sekolah ini menerapkan sistem PMI berbasis siklus *Plan-Do-Check-Act (PDCA)*, yang dikenal luas dalam teori *Total Quality Management (TQM)*. Penerapan pendekatan ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai melalui proses yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

Pada tahap perencanaan (*Plan*), sekolah menetapkan sasaran mutu yang terukur, seperti peningkatan rata-rata nilai ujian nasional sebesar 10% serta peningkatan tingkat kepuasan orang tua terhadap layanan pendidikan. Sasaran mutu ini dirumuskan dalam rapat kerja tahunan yang melibatkan seluruh unsur sekolah, termasuk guru, staf, dan komite sekolah. Keterlibatan seluruh pihak dalam tahap perencanaan mencerminkan adanya partisipasi kolektif dalam menentukan arah kebijakan mutu sekolah.

Pada tahap pelaksanaan (*Do*), guru menerapkan model pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) untuk mendorong kreativitas dan kemandirian siswa. Selain itu, sekolah mengembangkan sistem evaluasi digital yang memungkinkan pemantauan kemajuan belajar siswa secara real-time. Inovasi ini membantu guru dalam menilai hasil belajar secara lebih akurat dan efisien, sekaligus menjadi dasar dalam menyusun program tindak lanjut pembelajaran.

Tahap berikutnya, yaitu pemeriksaan (*Check*), dilakukan melalui kegiatan monitoring rutin setiap semester oleh tim penjamin mutu sekolah. Tim ini menilai ketercapaian indikator mutu yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil monitoring kemudian dibahas dalam forum refleksi guru, di mana setiap guru diberi kesempatan untuk menyampaikan kendala yang dihadapi serta memberikan usulan perbaikan. Melalui mekanisme ini, sekolah memastikan bahwa setiap proses pembelajaran dan manajemen berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Selanjutnya, pada tahap tindakan (*Act*), sekolah melakukan berbagai perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Perbaikan tersebut mencakup penyempurnaan kurikulum, penyusunan program pelatihan guru, serta penyesuaian metode pembelajaran agar lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik. Dalam kurun waktu tiga tahun, sekolah ini berhasil meningkatkan nilai akreditasi menjadi kategori A dan memperoleh penghargaan dari Dinas Pendidikan setempat. Selain itu, banyak siswa yang berhasil meraih prestasi akademik maupun non-akademik di luar ekspektasi, yang menjadi bukti konkret keberhasilan pelaksanaan PMI. Kesadaran para pendidik terhadap pentingnya peningkatan mutu juga semakin tinggi, di mana mereka memahami bahwa mutu pendidikan merupakan hasil dari kolaborasi semua pihak, bukan hanya tanggung jawab satu unsur tertentu.

Keberhasilan SMP Negeri 2 Tarutung menunjukkan bahwa penerapan PMI yang efektif tidak semata-mata bergantung pada keberadaan dokumen mutu, melainkan pada komitmen kolektif seluruh warga sekolah untuk terus belajar dan berinovasi secara berkelanjutan. Implementasi PMI berbasis data, refleksi, dan perbaikan berkesinambungan menjadi faktor kunci yang membuat sekolah ini mampu mempertahankan status unggulannya. Hingga kini, SMP Negeri 2 Tarutung menjadi salah satu role model dalam pengembangan mutu pendidikan di tingkat daerah, sekaligus contoh nyata keberhasilan penerapan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan sekolah menengah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penjaminan Mutu Internal (PMI) memiliki posisi strategis sebagai pilar utama dalam upaya peningkatan mutu dan pengembangan sekolah unggulan. PMI berfungsi sebagai sistem pengendalian, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan yang memastikan seluruh komponen pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Melalui implementasi PMI, sekolah mampu memetakan kekuatan dan kelemahan internal, serta mengembangkan strategi peningkatan mutu yang berbasis data dan kebutuhan nyata di lapangan.

Secara konseptual, PMI merupakan bagian integral dari manajemen mutu pendidikan modern, yang menekankan pentingnya *continuous improvement* (perbaikan berkelanjutan), *accountability* (akuntabilitas), dan *participatory management* (manajemen partisipatif). Dengan adanya sistem PMI yang efektif, sekolah dapat menjaga konsistensi mutu dalam jangka panjang, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut.

Mulai Pelaksanaan PMI juga menjadi sarana untuk membangun budaya mutu (*quality culture*) di lingkungan sekolah. Budaya ini menuntut keterlibatan aktif seluruh warga sekolah dari kepala sekolah, guru, staf administrasi, peserta didik, hingga komite sekolah untuk bersama-sama menjadikan mutu sebagai tanggung jawab bersama. Tanpa dukungan dan kesadaran kolektif, PMI hanya akan berhenti pada tataran formalitas administrasi.

Namun demikian, implementasi PMI tidak lepas dari tantangan. Beberapa hambatan yang sering muncul antara lain keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami konsep mutu, resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sarana prasarana pendukung, serta lemahnya sistem evaluasi internal. Oleh sebab itu, keberhasilan PMI sangat bergantung pada komitmen pimpinan sekolah dan dukungan seluruh stakeholder dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pembelajaran berkelanjutan.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa PMI bukan hanya sekadar alat pengawasan, tetapi juga strategi manajerial yang berorientasi pada peningkatan kualitas secara menyeluruh (holistik). Sekolah unggulan yang memiliki sistem PMI yang mapan akan mampu mempertahankan eksistensi dan daya saingnya, sekaligus menjadi model pengembangan mutu bagi sekolah lainnya. Hal ini dapat dilihat pada sekolah SMP N 2 Tarutung yang telah dilakukan penelitian sebelumnya..

Saran

Sekolah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen mutu melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Kepala sekolah harus berperan aktif sebagai agen perubahan yang mendorong pelaksanaan PMI secara konsisten. Perlu adanya peningkatan kesadaran seluruh stakeholder tentang pentingnya PMI. Pemerintah dan dinas pendidikan hendaknya memberikan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung PMI. Sekolah diharapkan terus berinovasi dan melakukan evaluasi rutin agar mutu pendidikan selalu terjaga dan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2022). Implementasi sistem penjaminan mutu internal dalam peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 29(2), 145–156. <https://doi.org/10.17509/jap.v29i2.34765>
- Arifin, Z., & Nurfadilah, S. (2022). Implementasi sistem penjaminan mutu internal dalam peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 29(2), 145–156. <https://doi.org/10.17509/jap.v29i2.34765>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Handayani, R. (2021). Manajemen mutu pendidikan dalam meningkatkan daya saing sekolah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 18(3), 210–219.
- Mulyasa. (2017). *[Data bibliografi tidak lengkap: mohon judul buku]*.
- Nasution, A. (2022). Evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 13(1), 45–56.
- Permendikbud. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sagala, S. (2019). *[Data bibliografi tidak lengkap: mohon judul buku]*.
- Sagala, S. (2021). *Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah*. Alfabeta.
- Santoso, T. (2020). Fungsi dan strategi penerapan penjaminan mutu internal di sekolah dasar. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 11(2), 175–184.
- Simanjuntak, D. (2023). Budaya mutu dan kinerja guru dalam implementasi penjaminan mutu internal. *Jurnal Manajemen Pendidikan Kristen*, 5(1), 22–34.

- Siregar, M. (2023). Optimalisasi penjaminan mutu internal di sekolah unggul: Studi kasus di Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 13(4), 355–367.
- Supriyadi, A. (2019). Peran kepala sekolah dalam implementasi sistem penjaminan mutu internal. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 26(1), 1–12.
- Suryadi, D. (2020). Sistem penjaminan mutu internal sebagai strategi peningkatan kualitas pendidikan nasional. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(2), 105–115.
- Suryadi, D., & Nurhadi, M. (2020). Sistem penjaminan mutu internal sebagai strategi peningkatan kualitas pendidikan nasional. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(2), 105–115.
- Wahyudi, H. (2021). Kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui sistem PMI. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 28(3), 300–311.
- Zainuddin, M. (2020). Penerapan siklus PDCA dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 11(2), 178–189.